

ASLI
UR. EK. PEMBANGUNAN 17-7-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

**PENGARUH BELANJA PUBLIK DAN KOMPLEKSITAS
EKONOMI TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI
INDONESIA**



Skripsi Oleh:

BALQYS RACHELY

01021281924177

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPRE

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH BELANJA PUBLIK DAN KOMPLEKSITAS EKONOMI TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI INDONESIA

Disusun Oleh,

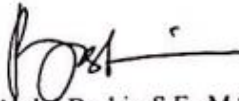
Nama : Balqys Rachely
NIM : 01021281924177
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Publik/ Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal :


Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si
NIP. 198506122015101101

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH BELANJA PUBLIK DAN KOMPLEKSITAS EKONOMI TERHADAP
DISPARITAS PENDAPATAN DI INDONESIA**

Disusun oleh :

Nama : Balqys Rachely
NIM : 01021281924177
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 27 Juni 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2023

Ketua

Anggota



Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si
NIP.198506122015101101



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ASLI
UR. EK. PEMBANGUNAN 17-7-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Balqys Rachely
NIM : 01021281924177
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Skripsi yang berjudul : “Pengaruh Belanja Publik dan Kompleksitas
Ekonomi Terhadap Disparitas Distribusi
Pendapatan di Indonesia”
Pembimbing : Dr. Abdul Bashir. S.E, M.Si
Tanggal Ujian : 27 Juni 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian thari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 17 Juli 2023

Pembuat Pernyataan

ASLI
UR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
17-7-2023



Balqys Rachely
NIM 01021281924177

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ . . . Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.
Sungguh Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.”*
-QS. Ghafir 40: Ayat 44

*“You’ve got no reason to be afraid
You’re on your own, kid
You always have been”*
-Taylor Swift

*Its okay to slow down for a moment,
You can catch your breath,
You can keep these passing moments
forever in your heart.*
-Jeon

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ∇ Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur atas ilmu dan berkah yang diberikan kepada penulis
- ∇ Orangtua ku, Bapak Abdurrahman dan Ibu Isma Nazarulita
- ∇ Adikku, Fachry Haekal Pahlevy, M. Irza Rasya S., Syahira Raisa S
- ∇ Keluarga Besar H. M. Naseh Ishak
- ∇ Teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya hingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "Pengaruh Belanja Publik dan Kompleksitas Ekonomi Terhadap Disparitas Pendapatan di Indonesia". Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr Muhammad Adam S.E, M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muklis, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Abdul Bashir, S. E., M. Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyempatkan waktu, memberikan kritik, saran dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Siti Rohima, S. E., M. Si. sebagai dosen penguji yang telah menyempatkan hadir, memberi bimbingan, nasihat, dan saran, kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah mendidik, membagi ilmu dan motivasi. Serta Staff Administrasi akademik Jurusan Ekonomi Pembangunan atas semua bantuan arahan yang diberikan

7. Orang tuaku Bapak Abdurrahman dan Ibu Isma Nazarulita Hamidah, terimakasih atas doa, kasih sayang, nasehat, support, perhatian dan segalanya yang tak terbalaskan. Kemudian adikku Fachry Haekal Pahlevy yang telah memberi semangat dan membantu selama pengerjaan skripsi. Tak lupa terimakasih kepada keluarga besar H. M. Naseh Ishak atas dukungan, dan doa. Gelar sarjana ini kupersembahkan untuk kalian.
8. Teman dekatku Riandhika Dwi H, Indah Pertiwi, M Al-Hakim Mayruli, Bella Intan Feronica dan Meutia Puspa P Blante yang selalu memberikan support, menyemangati, dan memberi motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Teman teman jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019, anggota grup kotakama, unfaedah, mandiri internship dan pihak yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih selalu memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
10. Kepada Grup SEVENTEEN terimakasih telah hadir dan memberikan afirmasi positif serta semangat kepada penulis selama masa perkuliahan terkhusus dalam pengerjaan skripsi.

Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dalam skripsi ini dengan harapan mendapatkan hasil sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 27 Juni 2023



Balqys Rachely

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA PUBLIK DAN KOMPLEKSITAS EKONOMI TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI INDONESIA

Oleh:

Balqys Rachely, Dr. Abdul Bashir. S.E, M.Si

Disparitas distribusi pendapatan merupakan permasalahan ekonomi yang dirumuskan dalam konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* karena dapat berdampak negatif bagi keadaan sosial politik suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari belanja kesehatan, belanja pendidikan, belanja sosial dan perdagangan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi seperti Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model (REM)*. Ruang lingkup penelitian mencakup 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial belanja kesehatan, belanja pendidikan, belanja perlindungan sosial dan perdagangan berpengaruh terhadap disparitas distribusi pendapatan di Indonesia. Belanja kesehatan dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan, sedangkan belanja perlindungan sosial dan perdagangan berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan

Kata Kunci: *Disparitas Pendapatan, Ketimpangan, Belanja Publik, Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, Belanja Perlindungan Sosial, Perdagangan, Kompleksitas Ekonomi*

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001

Ketua,



Dr. Abdul Bashir. S.E, M.Si
NIP.198506122015101101

ABSTRACT

THE EFFECT OF PUBLIC EXPENDITURE AND ECONOMIC COMPLEXITY ON INCOME DISPARITY IN INDONESIA

By:

Balqys Rachely, Dr. Abdul Bashir. S.E, M.Si

Disparity in income distribution is an economic problem that is formulated in the concept of Sustainable Development Goals (SDGs) because it can have a negative impact on the socio-political situation of a country. This study aims to determine the effect of health spending, education spending, social spending and trade on income distribution disparities in Indonesia. This type of research is quantitative. The data used is secondary data sourced from several agencies such as the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Bureau of Statistics (BPS). The analysis technique used is panel data regression analysis using the Random Effect Model (REM). The scope of research covers 34 provinces in Indonesia in 2010-2022. The results of the study show that simultaneously and partially health spending, education spending, social protection spending and trade have an effect on income distribution disparities in Indonesia. Spending on health and education has a negative effect on income disparity, while spending on social protection and trade has a positive effect on income disparity

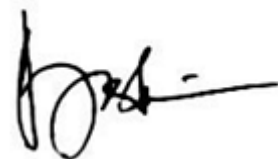
Keywords: *Income Disparity, Inequality, Public Spending, Health Spending, Education Spending, Social Protection Spending, Trade, Economic Complexity*

Aproved ,
Head Of Development Economics Program



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001

Chairman,



Dr. Abdul Bashir. S.E, M.Si
NIP.198506122015101101

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Balqys Rachely
NIM : 01021281924177
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah : Keuangan Daerah
Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Publik dan Kompleksitas Ekonomi Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan di Indonesia

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk di tempatkan pada lembar abstrak.

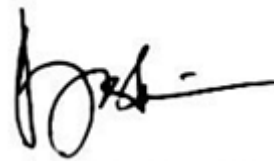
Palembang, Juli 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Ketua,



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001



Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si
NIP.198506122015101101

DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	Nama	Balqys Rachely
	NIM	01021281924177
	Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 26 April 2002
	Alamat	Jl Dr M Isa Irg KIAA No 1091 RT 14 RW 04 Kel Kuto Batu Kec Ilir Timur III
	Nomor Handphone	0895-3060-9952
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Tinggi	155 cm	
Berat	51 kg	
Email	balqisrachel26@gmail.com	
RIWAYAT PENDIDIKAN		
2007-2013	SDN 59 Palembang	
2013-2016	SMPN 50 Palembang	
2016-2019	SMKN 1 Palembang	
2019-2023	S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN ORGANISASI		
2021-2022	Bendahara Umum I IMEPA FE UNSRI	
2020-2021	Staff Alhi Bendahara Umum BEM KM FE UNSRI	
2020-2021	Sekertaris Divisi DAD BO EIT FE UNSRI	
2019-2020	Staff Muda Sekertaris Kabinet BEM KM FE UNSRI	
PENGALAMAN KERJA		
2022	Young Banker Program Intern PT Bank Mandiri (Persero) – Kampus Merdeka	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPRE.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRASI KARYA ILMIAH.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	12
2.1.2 Teori Human Capital.....	15
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.4 Konsep Disparitas	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Konseptual	21
2.4 Hipotesis Penelitian.....	23

3.	23
4.	BAB III METODOLOGI PENELITIAN 24
3.1	Ruang Lingkup Penelitian 24
3.2	Sumber dan Jenis Data 24
3.3	Teknik Analisis 24
3.3.1	Model Regresi 24
3.3.2	Indeks Gini 25
3.4	Model Estimasi Data Panel 26
3.5	Penentuan Model Regresi Data Panel 27
3.6	Uji Asumsi Klasik 28
3.7	Uji Statistik 30
3.8	Definisi Operasional 31
4.	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33
4.1	Gambaran Umum Indonesia 33
4.2	Gambaran Umum Variabel 38
4.3	Hasil Analisis Data 60
4.4	Pembahasan 69
	BAB V PENUTUP 77
5.1	Kesimpulan 77
5.2	Saran 78
	DAFTAR PUSTAKA 79
	LAMPIRAN 89

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Provinsi di Indonesia	35
Tabel 4.2 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Harga Konstan.....	37
Tabel 4.3 Pengeluaran Pemerintah Indonesia Bidang Pendidikan.....	50
Tabel 4.4 Pengeluaran Pemerintah Indonesia Bidang Perlindungan Sosial	53
Tabel 4.5 Kondisi Perdagangan Luar Negeri Indonesia (Miliar US\$).....	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Chow.....	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Hausman	63
Tabel 4.10 Hasil Lagrange Multiplier	64
Tabel 4.11 Ouput Regresi Data Panel	65
Tabel 4.12 Tabel Koefisien <i>Cross-Seciton Random Effect</i>	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat ketimpangan Indonesia (Gini Index) Tahun 2000-2021.....	3
Gambar 1.2 Gini Ratio Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2022	4
Gambar 1.3 Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi Tahun 2005-2021	6
Gambar 2.1 Kurva Hukum Wagner	13
Gambar 2.2 Kurva U-Terbalik Kuznet.....	18
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	22
Gambar 4.1 Peta Indonesia	33
Gambar 4.2 Gini Ratio Indonesia Tahun 2022	39
Gambar 4.3 Gini Ratio Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2005-2022.....	40
Gambar 4.4 Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2005-2022.....	42
Gambar 4.5 Gini Ratio Provinsi di Nusa Tenggara dan Bali Tahun 2005-2022 ..	43
Gambar 4.6 Gini Ratio Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2005-2022	44
Gambar 4.7 Gini Ratio Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2005-2022.....	45
Gambar 4.8 Gini Ratio Provinsi di Pulau Maluku dan Papua Tahun 2005-2022 .	46
Gambar 4.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Kesehatan Indonesia	48
Gambar 4.10 Belanja Kesehatan Berdasarkan Provinsi Tahun 2021	49
Gambar 4.11 Realisasi Belanja Pendidikan Berdasarkan Provinsi 2020-2022.....	52
Gambar 4.12 Realisasi Belanja Perlindungan Sosial Per-Provinsi 2020-2022.....	55
Gambar 4.13 Perdagangan di Indonesia Berdasarkan Provinsi 2020-2022	58
Gambar 4.14 Hasil Uji Normalitas (diolah).....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Asli Regresi Panel Ketimpangan, Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, Belanja Perlindungan Sosial, dan Perdagangan di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2010-2022.....	89
Lampiran 2 Data Transformasi Logaritma Ketimpangan, Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, Belanja Perlindungan Sosial, dan Perdagangan di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2010-2022.....	97
Lampiran 3 Gini Ratio Indonesia.....	104
Lampiran 4 Gini Ratio 34 Provinsi di Indonesia 2022	104
Lampiran 5 Data Anggaran dan Realisasi Belanja Publik Pemerintah Indonesia Tahun 2005-2022	105
Lampiran 6 Uji Chow.....	105
Lampiran 7 Uji Hausman	105
Lampiran 8 Uji Lagrange Multiplier.....	106
Lampiran 9 Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i>	106
Lampiran 10 Hasil Regresi <i>Random Effect Model (Pool Data)</i>	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

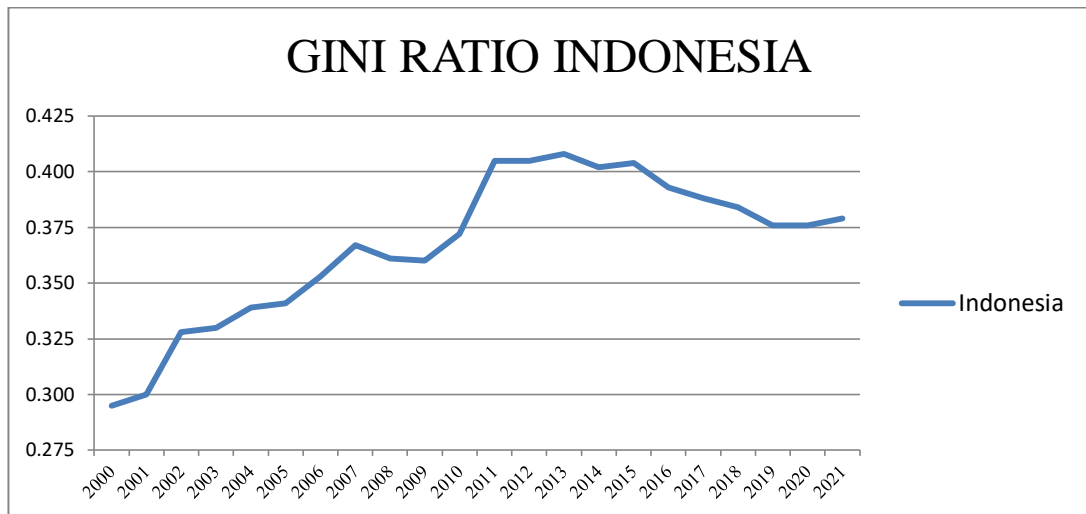
Kondisi yang ingin di capai sebuah negara adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diikuti distribusi pendapatan yang merata, menurut Kuznet (1955) disparitas meningkat pada tahap awal proses pembangunan ekonomi sebelum menurun dengan tahap perkembangan selanjutnya. Namun sering kali di negara berkembang pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi kemudian suatu negara akan stagnan hingga menyebabkan penurunan taraf hidup, sehingga disparitas menjadi konsekuensi dari *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi yang tidak terealisasi (Arsyad, 2010). Disparitas membawa potensi negatif bagi perekonomian, disparitas menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi, redistribusi pendapatan yang lebih tinggi yang kemudian berujung pada penurunan tingkat investasi (Perroti, 2011).

Kasus disparitas di berbagai negara, baik di negara berkembang ataupun negara maju terus mengalami peningkatan dan telah menjadi tren, terkhusus di negara berkembang disparitas akan lebih terasa efeknya karena fokus utama dari negara berkembang adalah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, kemudian hal ini berdampak pada tingkat pemerataan ekonomi yang biasa di sebut *trade-off*. Sehingga masalah kesenjangan pendapatan kerap kali menjadi pusat perhatian yang harus segera diatasi di seluruh negara. Seperti yang diketahui, dalam rencana pembangunan global yang dirumuskan dalam konsep Sustainable Development Goals (*SDGs*) bertujuan sebagai usaha demi mengurangi disparitas pendapatan yang terjadi pada

suatu negara. Indonesia sendiri termasuk dalam golongan negara yang memiliki masalah disparitas pendapatan, disparitas menggambarkan distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga digolongkan dengan masyarakat tingkat pendapatan tinggi dan golongan tingkat pendapatan rendah, atau terletak di bawah garis kemiskinan (*poverty line*).

(ADB, 2013) dalam publikasinya mengenai pengaturan tentang indikator pembangunan menjelaskan bahwa disparitas pendapatan diukur dengan menggunakan gini ratio, pengukuran gini ratio dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Kedua metode memberikan hasil yang berbeda. Umumnya disparitas yang diukur dengan pendekatan pengeluaran akan lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan pendapatan. Mayoritas negara-negara berkembang di Asia menggunakan pendekatan pengeluaran untuk menghitung disparitas pendapatan yang terjadi di negara-nya termasuk Indonesia. Nilai gini indeks berada antara nol hingga satu, bila nilai indeks gini semakin mendekati angka satu menunjukkan posisi disparitas pendapatan yang semakin tinggi.

Menurut (Buhaerah, 2017; Heryanah, 2017; Wibowo, 2017; Nurul et al., 2021; Ihsani & Rohman, 2022; Novianti & Panjaitan, 2022) Indonesia mengalami masalah ketimpangan yang diukur dengan menggunakan indeks gini, Gambar 1.1 menunjukkan posisi disparitas pendapatan yang berdasarkan pengeluaran masyarakat pedesaan dan perkotaan yang terjadi di Indonesia.



Sumber: World Bank

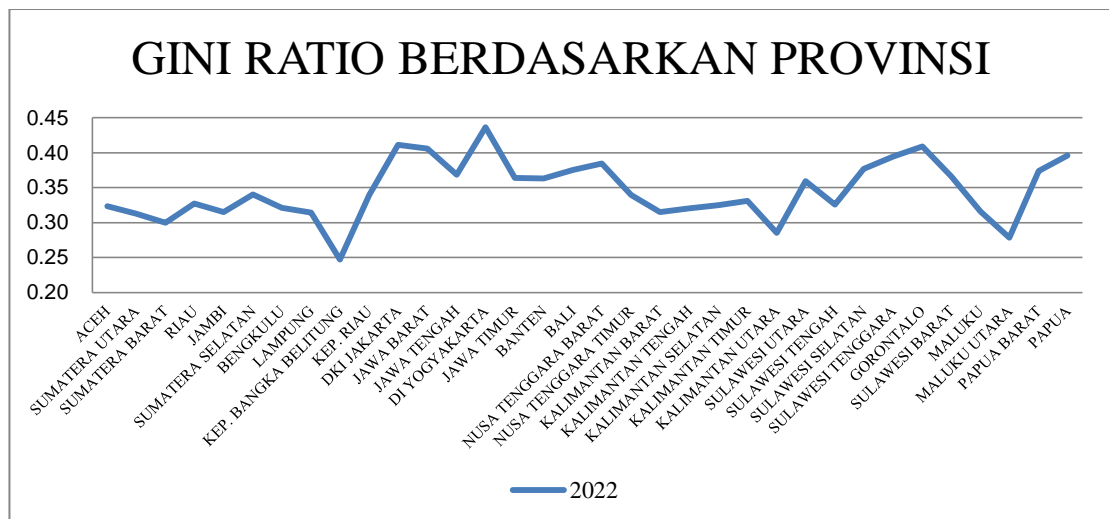
Gambar 1.1 Tingkat ketimpangan Indonesia (Gini Index) Tahun 2000-2021

Pada Gambar 1.1 dapat di simpulkan bahwa posisi disparitas Indonesia memiliki tren peningkatan dari tahun 2000. Meskipun berada di posisi tingkat disparitas sedang namun di Indonesia disparitas terus meningkat dari tahun 2000 hingga mencapai tingkat disparitas tertinggi di tahun 2015 yaitu 0,41. Tahun 2000 adalah tahun dimana otonomi daerah terjadi menurut (Yanuar, 2013) disparitas pendapatan tetap tinggi bahkan setelah otonomi daerah terjadi, hal ini disebabkan oleh perpindahan faktor produksi ke daerah pusat dan *backwash effect*, Bali dan wilayah pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih terfokus sehingga menarik tenaga kerja dan modal ke pusat pemerintahan kemudian membuat gap antara pusat dan daerah tertinggal.

Pada tahun 2016 disparitas mengalami penurunan dan masih dapat dikendalikan hingga di tahun 2019 disparitas mengalami tren yang berbalik, hingga pada tahun 2021 gini ratio Indonesia berada pada posisi 0,398. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah yang terjadi di Indonesia sehingga mengharuskan pemerintah untuk menetapkan kebijakan *lockdown*, dampak kebijakan *lockdown*

sangat rentan bagi masyarakat golongan menengah kebawah karena membawa dampak bagi pekerjaan dan pendapatan mereka yang kemudian berakhir pada penurunan aktivitas konsumsi. (Dwi Putra Santoso & Mukhlis, 2021; Novianti & Panjaitan, 2022; Oldiges & Nayyar, 2022; Putri & Wulandari, 2022)

Pada level Provinsi, disparitas pendapatan di Indonesia tetap terasa tercermin pada Gambar 1.2 yang menggambarkan posisi disparitas dengan range tertinggi terdapat di daerah Pulau Jawa, Sulawesi dan sekitarnya berbanding dengan Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki tingkat disparitas pendapatan cenderung rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 Gini Ratio Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2022

Provinsi yang menempati posisi terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indeks gini sebesar 0,247. Posisi terendah diraih karena dampak dari peningkatan pengeluaran konsumtif pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di iringi dengan kemampuan penyerapan yang baik sehingga efek multiplier dapat bekerja secara efektif (Aprillia et al., 2021) dampak baik ini merespon pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

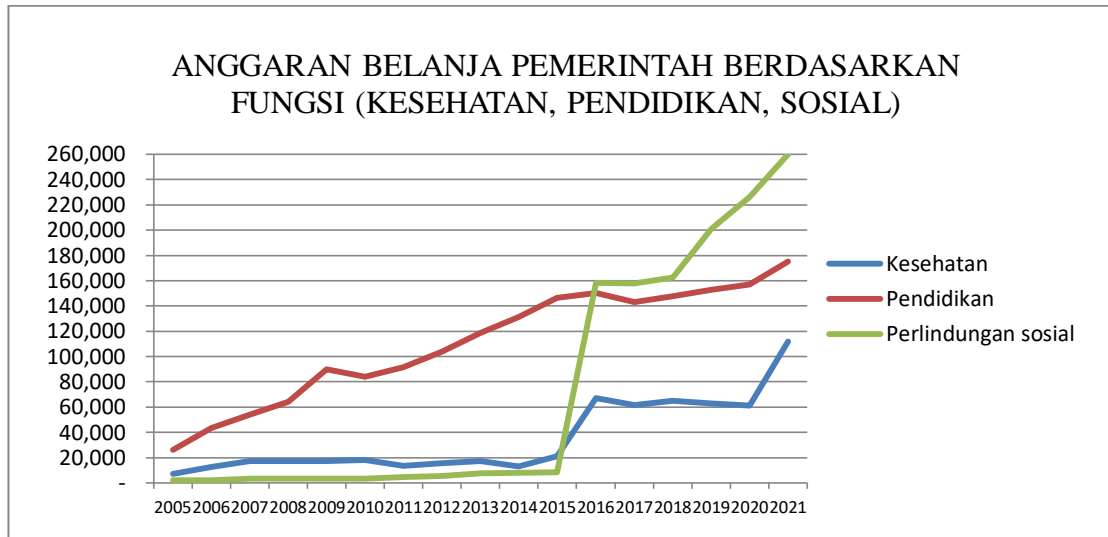
meningkatkan porsi belanja barang dan modal tiap tahun nya (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019).

Provinsi yang memiliki permasalahan disparitas pendapatan tertinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks gini sebesar 0,436. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup baik tetapi dampak yang dirasakan belum signifikan karena tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas masyarakat, kemudian masalah pengangguran yang belum terselesaikan dengan baik yang menjadi penyebab posisi disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi tertinggi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan pada Provinsi Indonesia belum tersebar dengan baik, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga mengalami ketimpangan (Harris & Yunani, 2019) selain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah beberapa Provinsi lainnya memiliki masalah ketimpangan yang di dibuktikan oleh (Putri & Wulandari, 2022; Heryanah, 2017; Novianti & Panjaitan, 2022; Sulistyanningrum & Tjahjadi, 2022).

Disparitas pendapatan sering di hubungkan dengan belanja pemerintah terkhusus belanja untuk kebutuhan publik. Belanja Publik merupakan belanja wajib yang dikeluarkan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik. (DJPK Kemenkeu RI, n.d.) Beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai daerah (Cammeraat, 2020; Ernawati et al., 2021; Halaskova & Bednar, 2020; Hassan et al., 2021; Mukhlis & Simanjuntak, 2018; Sánchez & Pérez-Corral, 2018; Susetyo et al., 2018) menyatakan bahwa belanja publik memiliki

hubungan dengan disparitas pendapatan. Berikut data perkembangan belanja pemerintah Indonesia berdasarkan fungsi untuk layanan pokok publik:



Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia (diolah)

Gambar 1.3 Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi Tahun 2005-2021

Gambar 1.3 menunjukkan posisi anggaran pemerintah dalam alokasi penyediaan kebutuhan publik, pemerintah setiap tahun meningkatkan anggaran pada kebutuhan pokok seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan dengan harapan pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan kemudian sejahteranya kualitas hidup masyarakat dapat berdampak pada pemerataan pendapatan masyarakat Indonesia. (Susetyo et al., 2018) Mengaitkan disparitas pendapatan dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses utilitas publik, (Halaskova & Bednar, 2020) menghubungkan dengan belanja proteksi publik seperti asuransi dan bantuan biaya hidup kemudian dapat dilihat dari perkembangan anggaran untuk perlindungan sosial mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai tahun 2016, mengacu pada pers (Bappenas, 2016) kenaikan anggaran belanja sosial pemerintah disebabkan oleh peningkatan nominal bantuan yang di berikan

kepada masyarakat terdaftar di dalam program PKH, bantuan sosial disabilitas dan kemensos melakukan intervensi ke bidang kesehatan seperti perbaikan gizi dan kesehatan ibu hamil.

Keadaan pandemi di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk memecah fokus pengeluaran untuk bantuan sosial, sehingga anggaran pemerintah untuk kebutuhan sosial melejit ke angka 260 miliar rupiah pada tahun 2022. Terbukti dampak dari program sosial ini dapat menurunkan nilai gini ratio sebesar 0,01 pada tahun 2015 menjadi 0,40 yang mula nya 0,41. (Afonso & Schuknecht, 2008; Pestieau, 2006; Ulu, 2018) mengaitkan determinan pengeluaran sosial dengan disparitas pendapatan yang terjadi di negara OECD yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran sosial dan disparitas pendapatan.

(Bloch, 2020; da Costa & Gartner, 2017) menyatakan hubungan belanja pendidikan dan kesehatan terhadap disparitas pendapatan. Menurut (Sulistyaningrum & Tjahjadi, 2022) terdapat beberapa poin yang sangat mempengaruhi disparitas pendapatan satu diantaranya adalah lama pendidikan masyarakat, sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dolumbia & Kinda, 2019) menemukan bahwa kurangnya mobilitas masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan akan memperparah disparitas pendapatan yang terjadi di Indonesia. Sehingga pengalokasian dana untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan penting dilakukan, pada Gambar 1.3 perkembangan anggaran belanja pendidikan dan kesehatan terus meningkat mulai dari tahun 2005 dimana pemerintah menganggarkan dana sebesar 25,9 miliar untuk pendidikan dan 7,0 miliar untuk kesehatan dan terus mengalami

peningkatan hingga tahun 2021 Pemerintah menganggarkan dana sebesar 175,2 miliar untuk kebutuhan pendidikan dan 139,5 miliar untuk kebutuhan kesehatan.

Kebijakan pemerintah Indonesia telah sejalan dengan teori belanja pemerintah dimana alokasi belanja dilakukan untuk mensejahterakan rakyat dan demi kepentingan bersama sehingga dalam hal ini penggunaan APBD dapat di anggarkan untuk keperluan pembiayaan masyarakat di daerah tersebut. Belanja pemerintah secara umum berpengaruh terhadap disparitas yang terjadi antar wilayah (Sari et al., 2021). Upaya pemerintah dalam mengontrol tingkat disparitas di Indonesia agar tetap stabil adalah dengan menyediakan kebutuhan infrastruktur publik melalui anggaran belanja pemerintah berikut anggaran pemerintah dalam belanja publik.

Determinan disparitas pendapatan biasa dilibatkan dengan faktor sosial ekonomi seperti institusi, pengeluaran sosial dan tingkat pengembalian modal (Chu & Hoang, 2020, Autor, 2014) namun pada titik tertentu faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas adalah kapabilitas suatu negara dalam kegiatan produksi, kompleksitas ekonomi adalah konsep yang mengukur tingkat produktifitas suatu negara (Hartmann, Guevara, Jara-Figueroa, Aristarán, & Hidalgo, 2017, Cristelli, Gabrielli, Tacchella, Caldarelli, & Pietronero, 2013). Menurut (Hidalgo & Hausmann, 2009) kompleksitas ekonomi adalah proses jangka panjang. Selama proses ini, faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan lainnya terus berkembang dan dapat mempengaruhi sifat hubungan antara kompleksitas ekonomi dan disparitas pendapatan. Sehingga faktor kompleksitas adalah komponen yang bersifat fluktuatif tergantung dengan kondisi yang terjadi

di suatu daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas ekonomi dapat menggunakan ekspor atau perdagangan seperti pengamatan yang dilakukan (Cristelli et al., 2013).

Upaya pemerintah untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pengurangan kemiskinan, upaya pemerintah dalam menganggulangi kemiskinan harus sesuai dengan pemerataan pendapatan masyarakat (Van Leeuwen and Földvárian Leeuwen & Földvári, 2016). Merujuk pada Gambar 1.1 posisi ketimpangan Indonesia secara nasional berada pada posisi tingkat disparitas sedang, pada posisi ini disparitas dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan perluasan tingkat kemiskinan. (Chu & Hoang, 2020) menyarankan bahwa untuk merasakan dampak dari kompleksitas ekonomi dalam menurunkan disparitas harus dilakukan upaya seperti peningkatan kegiatan produksi dan efisiensi belanja publik untuk mencapai kebebasan, selanjutnya (Aydan et al., 2022; Novianti & Panjaitan, 2022) meneliti bahwa efek belanja publik seperti belanja pendidikan kesehatan dan sosial memiliki dampak yang berbeda di tiap daerah tergantung dengan pendapatan di daerah tersebut. Sehingga kajian mengenai pemerataan distribusi pendapatan secara regional perlu dilakukan.

(Novianti & Panjaitan, 2022) menyatakan bahwa penting untuk mengetahui dampak pemberian bantuan sosial melalui proram pemerintah karena memiliki potensi dalam penurunan disparitas pendapatan. Upaya pemerintah melalui belanja publik dan kompleksitas ekonomi yang di ukur menggunakan tingkat perdagangan dapat berkontribusi dalam upaya pemerintah dalam proses pemerataan pendapatan sehingga penelitian dapat disimpulkan dalam judul

“Pengaruh Belanja Publik dan Kompleksitas Ekonomi Terhadap Disparitas Pendapatan di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh belanja sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan perdagangan terhadap disparitas pendapatan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pengaruh belanja sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan perdagangan terhadap disparitas pendapatan di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan dilakukan nya sebuah penelitian, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Kesimpulan dari penelitian bisa menjadi informasi untuk masyarakat yang memiliki keingintahuan di bidang belanja pemerintah sektor publik, kompleksitas dan disparitas pendapatan.
- b. Diharapkan hasil peneltian dapat menambah referensi yang berhubungan dengan pengeluaran pemerintah sektor publik, kompleksitas ekonomi dan disparitas pendapatan yang kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kajian topik ini.

c. Hasil diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan terkhusus dalam bidang penganggaran belanja publik dan pembangunan daerah, kemudian menjadi saran untuk pengembangan penelitian seterusnya.

2. Manfaat Praktis

a. Kesimpulan penelitian diharapkan bisa menjadi pedoman atau acuan dalam proses pengambilan keputusan bagi para pemangku kebijakan untuk menetapkan kebijakan mengenai penganggaran belanja publik, kompleksitas ekonomi dan disparitas pendapatan.

b. Penelitian diharapkan dapat berkontribusi untuk pemerintah dan organisasi tertentu mengenai belanja publik, kompleksitas ekonomi dan disparitas pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2013). *Framework of Inclusive Growth Indicators 2013*. Key Indicators for Asia and the Pacific.
- Adelman, I., & Morris, C. T. (1973). *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. Stanford University Press.
- Adolf, H. (2016). *Hukum Perdagangan Internasional*. Sinar Grafika.
- Afonso, A., & Schuknecht, L. (2008). Income Distribution Determinants and Public Spending Efficiency. *European Central Bank*, 861, 1–55.
- Alaminos, Estefanía & Geske, S. (2022). *Impact of health social transfers in kind on income distribution an inequality*.
- Anderson, Edward, d'Orey, M. A. J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2018). Does Government Spending Affect Income Inequality? A Meta-regression Analysis. *World Development*, 103, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>
- Anderson, E., d'Orey, M. A. J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2018). Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis. *World Development*, 103, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>
- Aprillia, A., Wardhani, R. S., & Akbar, M. F. (2021). Analysis of Factors Affecting Poverty in the Province of the Bangka Belitung Islands. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(2), 188. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i2.29184>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Ataguba, J. E. (2021). The Impact of Financing Health Services on Income Inequality in an Unequal Society: The Case of South Africa. *Applied Health Economics and Health Policy*, 19(5), 721–733. <https://doi.org/10.1007/s40258-021-00643-7>

- Autor, D. H. (2014). Skills, education, and the rise of earnings inequality among the “other 99 percent.” *Science*, 344(6186), 843–851. <https://doi.org/10.1126/science.1251868>
- Aydan, S., Bayin Donar, G., & Arian, C. (2022). Impacts of Economic Freedom, Health, and Social Expenditures on Well-Being Measured by the Better Life Index in OECD Countries. *Social Work in Public Health*, 37(5), 435–447. <https://doi.org/10.1080/19371918.2021.2018083>
- Baldwin, R. E. (1983). *Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang* (Kedua). Bina Aksara. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20155219&lokasi=lokal>
- Bappenas. (2016). *PKH Untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan menuju Indonesia Sejahtera*. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/pkh-untuk-pengurangan-kemiskinan-dan-ketimpangan-menuju-indonesia-sejahtera>
- Barrientos, A. (2019). The Role of Social Assistance in Reducing Poverty and Inequality in Asia and The Pacific. *ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 62*, 62, 1–30. www.adb.org
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: a theoretical and empirical analysis with special reference to education*. National Bureau of economic.
- Bloch, C. (2020). Social spending in South Asia — an overview of government expenditure on health , education and social assistance. In *International Policy Centre for Inclusive Growth*. https://ipcig.org/publication/29705?language_content_entity=en
- Bontis, N. (1999). Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field. *International Journal of Technology Management*, 18, 433–463. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1504/IJTM.1999.002780>

- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2019). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka*. <https://babel.bps.go.id>.
- Buhaerah, P. (2017). Pengaruh Finansialisasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Asean : Analisis Data Panel. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 19(3), 335–352. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=BSZOSwYAAAAAJ&cstart=200&pagesize=100&citation_for_view=BSZOSwYAAAAAJ:DrR-2ekChdkC
- Cammeraat, E. (2020). The relationship between different social expenditure schemes and poverty, inequality and economic growth. *International Social Security Review*, 73(2), 101–123. <https://doi.org/10.1111/issr.12236>
- Carraro, L., & S.L. Marzi, M. (2021). Effects of social protection on poverty and inequality. *Handbook on Social Protection Systems*, 582–595. <https://doi.org/10.4337/9781839109119.00075>
- Castelló-Climent, A., & Doménech, R. (2021). Human capital and income inequality revisited. In *Education Economics* (Vol. 29, Issue 2). <https://doi.org/10.1080/09645292.2020.1870936>
- Cerdeiro, D., & Komaromi, A. (2017). The Effect of Trade on Income and Inequality: A Cross-Sectional Approach. *International Monetary Fund, March*, 1–7.
- Chu, L. K., & Hoang, D. P. (2020). How does economic complexity influence income inequality? New evidence from international data. *Economic Analysis and Policy*, 68, 44–57. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.08.004>
- Cristelli, M., Gabrielli, A., Tacchella, A., Caldarelli, G., & Pietronero, L. (2013). Measuring the Intangibles: A Metrics for the Economic Complexity of Countries and Products. *PLoS ONE*, 8(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070726>

- da Costa, G. P. C. L., & Gartner, I. R. (2017). The effect of allocation function in budgeting to reduce income inequality in Brazil: An analysis of spending on education and health from 1995 to 2012. *Revista de Administração Pública*, 51(2), 264–293.
- Dabla-norris, E., & Kochhar, K. (2015). Causes and Consequences of Income Inequality : A Global Perspective. *IMF*, 1–39.
- Dias, W., & Indrawati, L. R. (2021). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 95–104. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i2.268>
- DJPK Kemenkeu RI. (n.d.). *Belanja Daerah dan Pelayanan Publik*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Doumbia, D., & Kinda, T. (2019). Reallocating Public Spending to Reduce Income Inequality. *IMF Working Papers*, 2019(188). <https://doi.org/10.5089/9781513511863.001>
- Dwi Putra Santoso, F., & Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 146–162. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p146-162>
- Ekananda, M. (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, 9(164), 1–12. <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Ghozali, I. (2013). Ghozali, Imam (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2011). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Selemba Empat.
- Halaskova, R., & Bednar, P. (2020). Relationship of social protection expenditures and socio-economic indicators: A panel data analysis of the EU countries. *Montenegrin Journal of Economics*, *16*(2), 19–31. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2020.16-2.2>
- Harris, F., & Yunani, A. (2019). Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten-Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016: Sebuah Perbandingan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *2*(2), 480. <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i2.1187>
- Hartmann, D., Guevara, M. R., Jara-Figueroa, C., Aristarán, M., & Hidalgo, C. A. (2017). Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality. *World Development*, *93*, 75–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.020>
- Hartmann, D., Pinheiro, F. L., Chen, P., Elsner, W., & Pyka, A. (2022). Economic complexity and inequality at the national and regional level. *Handbook of Complexity Economics*, 1–26.
- Hassan, M., Alizadeh, M., & Ahmadvand, N. (2021). *Optimal Amount of Government Expenditure Components with the Goal of Reducing Income Inequality (The Case of Iran)*. *9*(1), 117–146. <https://doi.org/10.22099/ijes.2021.38897.1721>
- Heryanah, H. (2017). Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia: Berdasarkan Susenas 2008, 2011 Dan 2013. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, *10*(2), 16. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v10i2.26>
- Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *106*(26), 10570–10575. <https://doi.org/10.1073/pnas.0900943106>

- Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i1.16292>
- Jain-Chandra, S., Kinda, T., Kochhar, K., Piao, S., & Schauer, J. (2019). Sharing the Growth Dividend: Analysis of Inequality in Asia. *Journal of Banking and Financial Economics*, 2(2019), 5–28. <https://doi.org/10.7172/2353-6845.jbfe.2019.2.1>
- Jhingan, M. L. (2013). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada.
- Keefer, P., & Khemani, S. (2003). Democracy, Public Expenditures, and the Poor. *World Bank Policy Research Working Paper*, 20(June 2003), 1–27.
- Keynes, J. M. (1991). *Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga, dan Uang*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *American Economic Association*, 45(1), 1–28. [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/306155/mod_resource/content/1/Kuznets %281955%29 Economic Growth and income inequality.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/306155/mod_resource/content/1/Kuznets%201955%20Economic%20Growth%20and%20income%20inequality.pdf)
- Larch, B. M. (2009). Impact of social expenditure on regional disparities in Poland. *Focus*, 6(3), 1–9.
- Mangkoesebroto. (1993). *Ekonomi Publik*. BPFE UGM.
- Mankiw, G. N. (2003). *Teori Makro Ekonomi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mukhlis, I., & Simanjuntak, T. H. (2018). The relationship between capital expenditure, income inequality, total population and economic growth post-implementation of local autonomy in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 39(1), 63–82.

- Murray, C. J. L., Abraham, J., Ali, M. K., Alvarado, M., Atkinson, C., Baddour, L. M., Bartels, D. H., Benjamin, E. J., Bhalla, K., Birbeck, G., Bolliger, I., Burstein, R., Carnahan, E., Chen, H., Chou, D., Chugh, S. S., Cohen, A., Colson, K. E., Cooper, L. T., ... Zabetian, A. (2015). The State of US health, 1990-2010: Burden of diseases, injuries, and risk factors. *Jama*, *310*(6), 591–608. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.13805>
- Nesha, R., Bernadette, R., & Yulianita, A. (2021). The Determinants of Income Inequality in Bangka Belitung Province. *MIR (Modernization. Innovation. Research)*, *12*(1), 83–90. <https://doi.org/10.18184/2079-4665.2021.12.1.83-90>
- Novianti, T., & Panjaitan, D. V. (2022). Income Inequality in Indonesia: Before and during the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *12*(3), 29–37. <https://doi.org/10.32479/ijefi.12996>
- Nurul, A., Arief, A., & Ekonomi, I. (2021). *Kemandirian Fiskal , Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*.
- OECD. (2015). Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, Paris. In *The New Zealand nursing journal. Kai tiaki* (Vol. 84, Issue 1). <http://www.oecd.org/els/soc/OECD2015-In-It-Together-Chapter1-Overview-Inequality.pdf>
- Oldiges, C., & Nayyar, S. (2022). *The Inequality Gap: The Bottom 40 May Be Further Than We Thought*. February, 1–5.
- Pestieau, P. (2006). *The Welfare State in the European Union: Economic and Social Perspectives*. Oxford University Press.
- Putri, N. D. K., & Wulandari, D. K. A. (2022). Determinant Analysis of Income Inequality in Indonesia 2015-2020. *Indonesian Journal of Human Resource Management*, *1*(1), 1–15.

- Rosadi, D. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Runtun Waktu Terapan dengan R: aplikasi untuk bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan* (N. W. Kurniawan (Ed.)). Andi Offset.
- Sánchez, Á., & Pérez-Corral, A. L. (2018). Government social expenditure and income inequalities in the European Union. *Hacienda Publica Espanola*, 227(4), 133–156. <https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.18.4.5>
- Sari, Y. M., Aliasuddin, & Silvia, V. (2021). Economic Growth and Income Inequality in ASEAN-5 Countries. *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 3(4), 34–44. <https://doi.org/10.1080/13547860008540786>
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1).
- Sholikah, N. R. (2022). Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Serta Pengaruhnya Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 10(3), 247–253.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006a). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006b). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sulistyaningrum, E., & Tjahjadi, A. M. (2022). Income Inequality in Indonesia: Which Aspects Cause the Most? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 37(3), 229–253. <https://doi.org/10.22146/jieb.v37i3.2015>
- Suparmoko, M. (1999). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. BPPE Yogyakarta.

- Susetyo, D., Rohima, S., Valeriani, D., & Bashir, A. (2018). Impact of Capital Expenditure and Public Utility Customers to Economic Development of District-City in Sumatra-Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(1), 126–135. <http://www.econjournals.com>
- Tambunan. (2001). *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. (2004). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Edisi Kedu). Erlangga.
- Ulu, M. I. (2018). The Effect of Government Social Spending on Income Inequality In OECD: A Panel Data Analysis. *International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences*, 1(3), 184–202.
- UN DESA. (2018). *Promoting Inclusion Through Social Protection Report On The World Social Situation 2018*.
- Urata, S., & Narjoko, D. A. (2017). International Trade and Inequality. *ADB Working Paper Series*, 675, 20–27. <https://www.adb.org/publications/international-trade-and-inequality>
- UU Nomor 20. (2003). *UU Nomor 20 Tahun 2003 Nasional, tentang Sistem Pendidikan*.
- UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). *UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Van Leeuwen and Földvária Leeuwen, B., & Földvári, P. (2016). The Development of Inequality and Poverty in Indonesia, 1932–2008. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 379–402. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1184226>
- Wahab, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Makro*. Alauddin University.

- WHO. (2018). Budget Matters for Universal Health Coverage: key Formulation and Classification Issues. *Health Financing Policy Brief*, 4, 25. <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1140370/retrieve>
- Wibowo, T. (2017). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 111–132. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.184>
- Yanuar. (2013). Disparitas Antar Wilayah Dan Provinsi Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 97–108.
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 4(1), 39–63.
- Yusran, L. (2013). *Hukum Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial*. Sinar Grafika.